



Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



### Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Budi S Purnomo<sup>1</sup>, Cahaya Putri<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia<sup>1</sup>

Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia<sup>2</sup>

**Abstract.** *This study aims to examine the effect of accountability, transparency, and supervision on the budget performance concept in value for money on regional work unit (SKPD) City of Bandung. The sample used in this study was 57 SKPD in City of Bandung. Field research are used to collect the data by using questionnaires as instruments. Partial Least Square (PLS) approach employed SmartPLS software as data analysis method. Statistical test was utilized as testing the hypothesis. The results of the study with inner models showed that accountability, transparency, and supervision significant effect partially on the budget performance concept in value for money on regional work unit (SKPD) City of Bandung.*

**Keywords.** *accountability; transparency; supervision; value for money.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Sampel dalam penelitian ini adalah 57 SKPD di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen. Metode analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t-statistic. Hasil penelitian dengan evaluasi inner model menunjukkan secara parsial akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.

**Kata Kunci.** akuntabilitas; pengawasan; transparansi; *value for money*.

**Corresponding author.** Email: [budi.purnomo@upi.edu](mailto:budi.purnomo@upi.edu)<sup>1</sup>, [henyaput@student.upi.edu](mailto:henyaput@student.upi.edu)<sup>2</sup>

**How to cite this article.** Purnomo, B., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 467-480. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14886>

**History of article.** Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v6i3.14886

Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan realisasi anggaran kota Bandung, rasio realisasi anggaran dengan anggaran tahun 2016, sebesar 102,55%, lebih tinggi dibanding 2015, yang mencapai 102,03%. Sebaliknya, tingkat efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bandung tahun 2016 mencapai 85,05%, menurun dibanding tahun 2015 yang mencapai 93,45%. Hal ini menunjukkan kinerja dalam merealisasikan PAD berdasarkan potensi pendapatan daerah riil menurun efisiensinya dan semakin kurang efektif.

Efisiensi merupakan suatu perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dengan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien. Sedangkan, efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio Efektivitas, semakin baik kemampuan daerah tersebut.

Selain itu, masih dari laporan BPK, ditemukan 11 SKPD yang melanggar azas kepatuhan dalam mengikuti aturan penggunaan anggaran pemerintah sebagaimana diatur dalam Permendagri. (<http://rmoljabar.com/read/2016/07/14/22555/Laporan-Kuangan-11-SKPD-KotaBandung-Masih-Bermasalah.html>).

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di masa otonomi daerah ini, adalah dengan memberlakukan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal (Khusufi 2013: 35). Penganggaran berbasis kinerja ini dimulai dengan perencanaan, yang berisi komitmen mengenai kinerja yang nantinya akan dihasilkan, kemudian penjabaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan. Sistem penganggaran ini menekankan pendekatan *value for money* yang menekankan pada ekonomis, efisiensi,

dan efektivitas. Suatu organisasi yang telah menggunakan biaya input terendah untuk mencapai output atau hasil yang optimum untuk mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah menerapkan *Value for money* (Mardiasmo 2005 hlm. 7).

Selain Anggaran kinerja, untuk mewujudkan *Good Government Governance* dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah pun harus mengimplementasikan Akuntabilitas dan Transparansi. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Indra, 2010:385). Adapun transparansi berarti mempertanggung jawabkan apa-apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi relevan, dan memberikan laporan pada pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, publik secara terbuka, dan kemudian di publikasikan (Haryatmoko, 2011, hlm.112).

*Value for Money* dapat menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga penting untuk diimplementasikan. Tercapainya

pengelolaan anggaran yang baik, tentu tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri maupun lembaga pengawas khusus lainnya yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Menurut Mardiasmo (2002:126) kinerja anggaran daerah melibatkan tiga elemen dasar yang saling terkait dan terintegrasi. Ketiga elemen tersebut adalah (1) Masyarakat, (2) DPRD, (3) Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, untuk memastikan perencanaan yang telah dilakukan dapat berjalan dengan efisien, efektif dan ekonomis diperlukan adanya pengawasan.

Wiguna, dkk (2015) menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah secara signifikan

dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Demikian pula halnya dengan Hanafiah, dkk (2016) yang menyimpulkan akuntabilitas, transparansi, pengawasan internal dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ketiga penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda. Berbeda dengan kedua peneliti sebelumnya, hasil penelitian Adiwiraya (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja, sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari paparan di atas maka akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dapat mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep *Value for money* pada pemerintah kota Bandung. *Value for Money* sebagai indikator yang memberikan informasi kepada publik, apakah anggaran pemerintah daerah telah dibelanjakan dengan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat atau tidak.

## KAJIAN LITERATUR

*Governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Koiman, 2009 : 273). Menurut Mardiasmo (2005 : 114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu tujuan implementasi *Good government governance* adalah untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan pemerintahan dengan tujuan masyarakat. Agar tujuan ini dapat tercapai, perlu adanya prinsip-prinsip *good government governance* yang diantaranya membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan dengan pengelolaan anggaran.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002 : 20). Pemegang amanah harus bisa mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas berarti memberikan ruang bagi publik untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Akuntabilitas sendiri dapat menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggarannya. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai alat ukur kinerja dalam sebuah organisasi termasuk organisasi sektor publik untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Utari Permana dan Yenni (2017) berpendapat bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik kinerja anggaran pemerintah daerah. Sementara Ismiarti (2013 : 90-91) menyimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Garini (2011) berpendapat akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hubungan kedua variabel tersebut juga diperkuat oleh Wandari (2015) yang menyimpulkan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah daerah. Ciri lain dari akuntabilitas ini selalu berkaitan dengan pengelolaan anggaran, di mana dalam pendekatannya menjelaskan semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik di pusat maupun daerah, semakin baik pula pengelolaan anggarannya (Mahmud, F.A, 2013).

Prinsip dalam *good government governance* selanjutnya adalah transparansi yang diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

individu untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai (Krina, 2003). Sementara Amitai Etzioni (2010 : 1) mendefinisikan transparansi sebagai: "...the principle of enabling the public to gain information about the operations and structures of a given equity. Transparency is often considered synonymous with openness and disclosure, although one can find subtle differences among these terms.". Adanya transparansi ini menjadikan masyarakat lebih kritis dalam menanggapi kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Selain itu, transparansi juga berperan sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah. Garini (2011) menyimpulkan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* untuk menghasilkan anggaran yang diharapkan. Kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, oleh karena itu semakin transparan kebijakan itu sendiri maka akses informasi dapat dengan mudah diketahui oleh publik. Hal senada diungkapkan oleh Rezky (2014) dan I Desak Nyoman Tri Wandari (2015) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Salah satunya dalam aktivitas pengelolaan anggaran yang perlu dilakukan demi mencapai kinerja anggaran yang baik, yaitu dengan melakukan pengawasan secara memadai. Menurut Terry dan Rue (2005 : 10), pengawasan adalah mengukur pelaksanaan tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. Sedang Baswir, Revrison (1999 : 118) menyatakan salah satu aspek pengawasan adalah pemeriksaan, yang bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang

seharusnya. Apabila terdapat indikasi-indikasi penyimpangan hal ini dapat segera diperbaiki. Dalam pelaksanaannya pengawasan adalah kegiatan yang mengamati secara sungguh-sungguh yang kemudian membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika ternyata dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka penyimpangan atau hambatan tersebut segera dilakukan tindakan koreksi. Melalui tindakan korektif ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal (Pratuvandiandry, 2004, hlm, 19).

Dengan adanya pengawasan ini diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan dapat dicegah atau diperbaiki penyimpangannya. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Wiguna, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Hasil penelitian Rezky (2014) yang kemudian diperkuat oleh I Desak Nyoman Tri Wandari (2015), menunjukkan bahwa pengawasan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Adanya pengawasan ini mampu mencegah praktik-praktik menyimpang, sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan yang baik akan meningkatkan kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*.

Mardiasmo (2009 : 127) menjelaskan bahwa *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pada organisasi pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan anggaran yang menekankan pada tiga elemen penting, yakni ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berarti pemerolehan sumber daya (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Diharapkan dengan menerapkan elemen ekonomi ini, organisasi

sektor publik tidak melakukan pemborosan ataupun mengeluarkan anggaran untuk kegiatan yang tidak produktif. Elemen kedua, efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, dimana ini menunjukkan kesuksesan atau bahkan kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil).

**METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas, transparansi dan pengawasan mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep *Value for money* dalam penelitian ini digunakan metode kausalitas. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada kepala bagian anggaran, atau bendahara atau staf bagian anggaran pada SKPD Kota Bandung sebagai respondennya.

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian anggaran wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bagian anggaran sekretariat DPRD yang berada di kota Bandung yang berjumlah 57 bagian/unit, yang kesemuanya menjadi sampel.

Mengingat jumlah data dalam penelitian ini kurang dari 100, serta mengantisipasi terjadinya data yang hilang (*missing values*) dan multikolinearitas, maka seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. Pengujian bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* menggunakan evaluasi *inner model* yaitu analisa hasil hubungan antar konstruk. Hubungan antar konstruk dapat dikatakan signifikan jika memiliki nilai *T-Statistics* lebih besar dari 1,96 (Hair et al., 2012, hlm. 171).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian

model struktural, dapat dilihat dari nilai *t-statistic* antara variabel independen ke variabel dependen dalam tabel *Path Coefficient* pada *output Smart PLS* dibawah ini:

**Tabel 1 Nilai Path Coefficients dan Nilai R Square**

Parameter	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	R-Square
AT->KA	0.352	0.325	0.162	2.167	0.829
TR-> KA	0.314	0.347	0.140	2.237	
PG-> KA	0.305	0.297	0.135	2.263	

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2018

Pengaruh seluruh variabel eksogen terhadap variabel endogen pada model memiliki kontribusi sebesar 82,9%, sehingga pengaruh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini adalah sebesar 17,1%. Adapun persamaan jalur dan hasil uji signifikansi disajikan sebagai berikut:

$$KA = 0.352 AT + 0.314 TR + 0.305 PG + 0.171$$

**Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value For Money**

Berdasarkan data yang telah diolah, akuntabilitas yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung termasuk ke dalam kategori sangat baik. Hal ini terlihat dari perhitungan skor kuesioner yang diperoleh sebesar 93.04%. Akuntabilitas memiliki nilai *original sample* sebesar 0,352 yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pula kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada SKPD Kota Bandung. Akuntabilitas juga dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*, hal ini didasari oleh pengujian secara parsial atau biasa disebut dengan uji t dimana variabel akuntabilitas memiliki t-

hitung sebesar 2,167 yang berarti lebih besar daripada nilai t-tabel yaitu 1,96.

Penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pegawai pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung secara menyeluruh dikatakan sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan fakta yang menyatakan bahwa Kota Bandung adalah satu-satunya kota di Jawa Barat yang mendapatkan predikat A dalam laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Walaupun begitu, ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan lagi yaitu salah satunya pada indikator pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal, khususnya pada pernyataan tentang keterlibatan masyarakat dalam tahapan pengelolaan anggaran. Pemerintah sudah seharusnya melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan anggaran ini, agar apa yang menjadi program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian I Desak Nyoman Tri Wandari (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di kabupaten Buleleng. Dengan menjalankan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada pemberi amanah dengan baik maka kualitas kinerja pemerintah daerah baik dari sisi *financial* atau anggaran dapat meningkat dan menjadi lebih baik guna mencapai terwujudnya *good governance*.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value For Money**

Berdasarkan hasil analisis data, transparansi yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung termasuk ke dalam kategori sangat baik. Hal ini terlihat dari perhitungan skor kuesioner yang diperoleh sebesar 89.28%,

serta capaian nilai *original sample* sebesar 0,314 yang mengindikasikan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi maka akan semakin baik pula kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada SKPD Kota Bandung. Transparansi juga dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*, hal ini didasari oleh pengujian secara parsial atau biasa disebut dengan uji t dimana variabel transparansi memiliki t-hitung sebesar 2,237 yang berarti lebih besar daripada nilai t-tabel yaitu 1,96.

Penerapan transparansi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung secara menyeluruh dikatakan sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan fakta yang menyatakan bahwa pemerintahan Kota Bandung menerima penghargaan dari Managing Director Open Gov Asia Mohit Sagar atas konsep *smart city* yang diterapkan sehingga mampu mengelola pemerintahan yang transparan. Walaupun begitu, ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan, diantaranya penyampaian informasi tentang anggaran kepada publik setiap saat, agar masyarakat dapat memberikan usulan atau aspirasinya, jika menemukan informasi yang tidak sesuai dan perlu untuk didiskusikan kembali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Garini (2011), Rezky Mulya (2014), dan I Desak Nyoman Tri Wandari (2015) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Dengan menerapkan transparansi yang baik, maka salah satu dampak yang terjadi yakni dapat mengurangi terjadinya KKN, sehingga transparansi dapat dikatakan pula sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah.

### **Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep *Value For Money***

Hasil perhitungan skor kuesioner sebesar 93.09% menunjukkan variabel pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung termasuk ke dalam kategori sangat baik. Selain itu, capaian nilai *original sample* sebesar 0,305 mengindikasikan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan maka akan semakin baik pula kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada SKPD Kota Bandung. Pengawasan juga dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*, hal ini didasari oleh pengujian secara parsial yang disebut dengan uji t dimana variabel pengawasan memiliki t-hitung sebesar 2,263 yang berarti lebih besar daripada nilai t-tabel yaitu 1,96.

Penerapan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Dinas Kota Bandung secara menyeluruh dikatakan sudah sangat baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mardiasmo (2002 : 126) bahwa kinerja anggaran daerah melibatkan tiga elemen dasar yang saling terkait dan terintegrasi, yaitu: (1) Masyarakat, (2) DPRD, (3) Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pengawasan sangat perlu diterapkan untuk mencapai *value for money* yaitu efisien, efektif dan ekonomis. Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan indikator *output* (keluaran) pengawasan, dimana aspirasi masyarakat penting untuk dijadikan dasar pelaksanaan penyusunan anggaran, agar segala kebijakan atau program yang telah dibuat pemerintah dapat selaras dengan keinginan masyarakat untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rezky Mulya (2014) dan I Desak Nyoman Tri Wandari (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for*

*money*. Dengan menerapkan pengawasan yang baik maka setiap pelaksanaan kegiatan dapat dicegah atau diperbaiki penyimpangannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggarannya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pada SKPD kota Bandung melalui analisis deskriptif maupun analisis verifikatif dengan menggunakan alat uji statistik, dan pembahasan, maka dapat disimpulkan (1) Akuntabilitas telah diimplementasikan dengan sangat memadai, dan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Oleh karenanya semakin baik penerapan akuntabilitas maka akan semakin tinggi pula capaian kinerja anggaran berkonsep *value for money*. (2) Transparansi telah diimplementasikan dengan sangat memadai, dan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Oleh karenanya semakin baik penerapan transparansi maka akan semakin tinggi pula capaian kinerja anggaran berkonsep *value for money*. (3) Pengawasan telah diimplementasikan dengan sangat memadai, dan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Oleh karenanya semakin baik penerapan pengawasan maka akan semakin tinggi pula capaian kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Sesuai dengan pembahasan dan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan pada implementasi akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan pada SKPD Kota Bandung sudah memadai, namun terdapat beberapa indikator dari masing-masing variabel tersebut yang perlu ditingkatkan, yaitu: (1) Keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam tahapan pengelolaan anggaran sebagai salah satu indikator Akuntabilitas belum dilakukan secara optimal, oleh karenanya perlu ditingkatkan agar apa yang menjadi program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. (2) Penyampaian informasi terkait anggaran sebagai salah satu indikator dari transparansi belum optimal dilakukan, oleh karenanya

perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menerima informasi yang lebih lengkap dan dapat lebih memahami proses pelaksanaan anggaran yang sedang dilakukan (3) Keluaran pengawasan sebagai salah satu indikator dari pengawasan masih perlu dioptimalkan, oleh karenanya perlu ditingkatkan agar kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sebagai salah satu dasar penyusunan anggaran dapat meningkat pula.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk: memperluas lingkup penelitian selain variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan kinerja anggaran konsep *value for money*, dan melakukan pengujian dengan model lain yang dikembangkan sehingga hasil penelitian dapat lebih memberi gambaran yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiraya, M. F., & Sudana, I. P. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 11 No. 2.
- Amitai, Etzioni (2010). *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta: UI-press.
- Baswir, R. (1999). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia edisi ke-3*. Yogyakarta: BPF.
- Garini, Nadia. (2011). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kota Bandung*. Bandung: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UNIKOM.
- Hanafiah, R., Syukriy, A., & Saputra, M. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 4.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C.M., and Mena, J.A. (2012). An Assessment of the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research. *Journal of the Academy of Marketing Science* (40:1), pp. 414-433.
- Indra, Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Ismiarti. (2013). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah. *Tesis. Program Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Bengkulu. Bengkulu*
- Khusufi, M. S. (2013). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krina, P. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Mahmud, F. A. (2013). *Pengaruh Value for Money terhadap Akuntabilitas Publik*. Gorontalo.
- Mardiasmo. (2002, 2005, 2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pratuvaliandry. (2004). *Analisis Kinerja Badan Pengawas Daerah Kota Pare-Pare dalam Pelaksanaan Pengawasan di Pemerintahan Kota Pare-Pare*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Rezky, A. Mulya. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money pada Instansi pemerintah di Kabupaten Bone. *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Terry, Rue. G. & Leslie, W. R. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utari Permana, N. P., & Yenni Latrini, N. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi



Anggaran terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No.3.

- Wandari, I. T. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money pada instansi Pemerintah kabupaten Buleleng. *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Undiksha*.
- Wiguna, S. M. B., Yuniartha, G. A., & Surya Dermawan, N. A. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No.1.
- Diakses pada tanggal 2, November 2017, dari <http://rmoljabar.com/read/2016/07/14/2555/Laporan-Keuangan-11-SKPKKota-Bandung-MasihBermasalah.html>. (2, November 2017).

**LAMPIRAN**

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung Untuk Tahun Berakhir s.d 31 Desember 2016 dan 2015 (dalam rupiah)**

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%
		(Audited)			(Audited)	
Pendapatan						
*PAD	2.767.404.903.364	2.152.755.704.962	77,8	2.066.246.830.526	1.859.694.643.505	90
*PT	3.556.118.038.811	3.186.705.853.324	89,6	3.262.813.188.768	3.144.486.854.423,00	96,37
*LLPS	360.606.675.209	345.752.301.643	95,9	126.301.596.800	93.890.418.920	74,34
<b>Total Pendapatan</b>	<b>6.684.129.617.384</b>	<b>5.685.213.859.929</b>	<b>85,1</b>	<b>5.455.361.616.094</b>	<b>5.098.071.916.848</b>	<b>93,45</b>
Belanja						
*BO	5.336.672.986.293,47	4.575.469.446.261	85,7	4.623.533.972.302,19	3.914.018.385.824	84,65
*BM	1.995.568.170.865,53	1.254.021.785.263	62,8	1.908.650.351.654,81	1.287.802.827.811	67,47
*BTT	27.607.311.863	21.746.900	0,08	21.184.473.092	116.993.530	0,552
*BT	1.000.000.000	900.741.220	90,1	-	-	-
<b>Total Belanja</b>	<b>7.360.848.469.022</b>	<b>5.830.413.719.644</b>	<b>79,2</b>	<b>6.553.368.797.049</b>	<b>5.201.938.207.165</b>	<b>79,38</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>-676.718.851.638</b>	<b>-145.199.859.715</b>	<b>21,5</b>	<b>-1.098.007.180.955</b>	<b>-103.866.290.317</b>	<b>9</b>

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2015 dan 2016

**Tabel 2. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Bandung**

Tahun Anggaran	Rasio Efisiensi	Rasio Efektifitas
2015	102,03% (tidak efisien)	93,45% (efektif)
2016	102,55% (tidak efisien)	85,05% (kurang efektif)